



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MEDAN**



Jalan. Pinang Baris No. 114 Medan - 20127

# **RENCANA KERJA (RENJA) 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MEDAN**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024. Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 merupakan tahun pertama peleburan Dinas Lingkungan Hidup dengan Bidang Persampahan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan berdasar Perwal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 ini juga mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerjanya, Rencana Kerja ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis yang telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permendagri no. 90 tahun 2019 dirumuskan program Kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

RENJA Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah, serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Medan, September 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

dr. Suryadi Panjaitan, M.Kes, Sp.PD  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19640428 199903 1 001

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang	.....	4
1.2. Landasan Hukum	.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	.....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN .....</b>		<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja OPD Tahun Lalu 2022 dan Capaian Renstra OPD.....		9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....		10
2.3. Capaian Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2022 .....		11
2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....		56
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 .....		58
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....		59
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN .....</b>		<b>61</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....		61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....		62
3.3. Program, Kegiatan Tahun 2024 .....		63
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 ...</b>		<b>76</b>
4.1. Program dan Kegiatan tahun 2024.....		76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>98</b>

...

TABEL II.1	Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 .....	12
TABEL II.2	TC 29 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2022 .....	19
TABEL II.3	TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2022 .....	30
TABEL II.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup.....	42
TABEL II.5	Penjelasan, Rumusan, Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	43
TABEL II.6	Presentase (%) Program yang Terealisasi Tahun 2022.....	47
TABEL II.7	Capaian Kinerja Sesuai dengan Target dalam Dokumen Tahun 2022	48
TABEL II.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2022.....	55
TABEL II.9	Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Medan Tahun 2023 .....	60
TABEL III.1	Sasaran, Tujuan & Misi Beserta Indikatornya .....	64
TABEL III.2	Rencana Kerja & Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 (Tahun Berjalan) .....	64
TABEL IV.1	Rumusan Rencana Program Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	79

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif setelah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 74 dan pasal 126 mengamanahkan bahwa tahapan awal dalam penyusunan Renja adalah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan Renja tahun pertama penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Bidang Persampahan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan berdasar Perwal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Penjabaran Visi Misi Walikota dalam RPJMD Kota Medan, sehingga program dan kegiatan prioritas Walikota dapat tertampung pada Rencana Kerja dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
2. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dapat lebih optimal.
3. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum

terlaksana pada tahun 2022 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2023.

4. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
5. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Walikota Medan tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2021 – 2026 yang dikarenakan ada perubahan nomenklatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasar Perwal 97 Tahun 20022 mengharuskan adanya revisi Renstra untuk Tahun 2024-2026.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Medan Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 ini dimaksudkan :

1. Sebagai dokumen awal perencanaan pembangunan Kota yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang di sertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Memberikan arah pedoman penyusunan program, Kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Sebagai Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tentang arah perencanaan pembangunan kedepannya.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Medan Tahun 2024 ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan kota yang transparan dan akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan kota agar lebih terarah, efektif dan efisien.
3. Mendukung program Walikota Medan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024, disusun dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang :

**Latar Belakang**, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

**Dasar Hukum**, memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

**Maksud dan Tujuan**, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

**Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

#### BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang :

**Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 mengacu pada APBD yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

**Capaian Program Tahun 2022** berisikan pencapaian program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk tahun 2022 dan program kegiatan dan sub kegiatan apa yang tidak dilaksanakan beserta alasannya.

**Capaian Penetapan Kinerja (TAPKIN)** berisikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta berdasarakan Ketetapan Kinerja (TAPKIN).

**Analisis Kinerja Pelayanan OPD** berisikan pencapaian kinerja pada aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

**Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD** berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD** berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang :

**Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional** berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

**Tujuan dan Sasaran Renja SKPD** berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

**Program dan Kegiatan** berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

### BAB IV PENUTUP

**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam mencapai sasaran – sasaran yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Persampahan Kota Medan telah menyusun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2022, anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar Rp . 23.015.149.329,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.718.281.346,- dengan persentase sebesar 90,02 %. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Renstra OPD sebagaimana dalam tabel 2.1.

**2.1.1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan table tc 29**

Evaluasi capaian Kinerja dilakukan mulai dari tingkat program sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan). Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil penyempurnaan program/kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam Renstra . Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 dapat dijelaskan pada table II.1

**2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra OPD**

Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian sasaran Renstra pada tahun 2022 terhadap target yang direncanakan yang secara singkat dapat dijelaskan bahwa evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran dilakukan dengan melakukan analisis terhadap masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing – masing sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut :

### **1. Sasaran Strategis 1**

Persentase Peningkatan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Efektif dan Memadai.

### **2. Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif

### **3. Sasaran Strategis**

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Ijin lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH

### **4. Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

### **5. Sasaran Stragis 5**

Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

### **6. Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya Cakupan Are Pelayanan Persampahan

### **7. Sasaran Strategis 7**

Meningkatnya Pengurangan Sampah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah/realisasi APBD untuk perangkat Daerah .

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan paling tinggi adalah pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan terendah pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pencapaian program dan kegiatan T.A 2022 yaitu untuk capaian program adalah 100% yaitu 11 program yang teralisasi. Sedangkan untuk capaian kegiatan sebesar 100% yaitu 21 kegiatan, sedangkan sub Kegiatan capaiannya mencapai 97 % karena dari 67 sub kegiatan hanya 2 sub kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan masalah teknis, lihat table II.3

### **2.3. Capaian Penetapan Kinerja (Tapkin)**

Persentase capaian penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah 100 %. Dengan penjabaran yaitu jumlah penetapan kinerja adalah 11 program, 21 kegiatan, 67 sub kegiatan dan semuanya terealisasi. Untuk perincian capaian penetapan kinerja dapat dilihat pada tabel II.4

TABEL II.1  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen tase
1 03 04	I. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM & PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Penanganan Persampahan	100%-	Kota Medan-	13.329.903.449	10.868.531.750	2.461.371.699	81,53
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan-	100%	Kota Medan	13.329.903.449	10.868.531.750	2.461.371.699	81,53
X.XX.01.2.	II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	OPD	13.807.889.129	12.569.343.271	1.238.545.858	91,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia		OPD	56.242.000	48.740.000	7.502.000	87,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang tersedia	1 dok	Renja OPD dan forum OPD	54.742.000	47.740.000	7.002.000	87,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Dokumen Lakip (cetakan)	1.500.000	1.500.000	-	100,00
X.XX.01.2.02	Administrasi, Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi, Keuangan, Perangkat daerah Yang Tersedia	100%		10.087.723.000	9.650.781.476	436.941.524	96,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Pembayaran gaji & tunjangan ASN Jumlah ASN yg diberikan Gaji & Tunjangan	71 orang bulan	Gaji dan Tunjangan	10.086.223.000	9.649.281.476	436.941.524	96,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersedia	1 dok	Lap keuangan/cetak	1.500.000	1.500.000	-	100,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yg Tersedia	100%		388.825.112	272.323.810	116.501.302	70,00

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN dan Pegawai Lainnya di Peringkat Daerah Yang Diberikan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	144 Stell	Pakaian batik (72 stel),pakaian Seragam Putih (72 Stel)	131.490.000	97.179.060	34.310.940	74,00
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang Tersedia	144 stell	- pakaian dinas (72 stell) pakaian lapangan (72 Stell)	155.245.112	121.734.750	33.510.362	78,00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang –undangan	10 Orang/thn	- biaya kontribusi pelatihan 10 x Rp.8.000.000	102.090.000	53.410.000	48.680.000	52,00
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Cakupan administrasi umum Perangkat daerah yang Tersedia	100%		1.251.989.217	805.545.731	446.443.486	<b>64,00</b>
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	- lampu, kabel dsb	30.000.000	9.606.900	20.393.100	32,00%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan bahan logistik kantor	100%	- ATK, BBM Genset dan bahan pos	111.498.780	83.802.500	27.696.280	75,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan barang Cetak dan Penggandaan	100%	cetakan	50.000.000	49.852.250	147.750	99,00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	30 kali	1 kali kunjungan Rp. 1.000.000,-	30.000.000	26.475.000	3.525.000	88,00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat	30 Kali					
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis dengan baik pada perangkat daerah	1 laporan		23.350.000	22.550.000	800.000	87,00%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dikelola dengan baik	4 aplikasi	- belanja jasa tenaga ahli 4 x 12 pengelola dsb	240.000.000	238.950.000	1.050.000	99,00%
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Capaian barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah yang terpelihara	100%		385.557.800	353.854.000	31.703.800	<b>92,00%</b>
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	100%	20 laptop, 10 printer. 10 scanner + AC 2 Unit utl lab	385.557.800	353.854.000	31.703.800	92,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen tase
	<i>Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Bangunan Lainnya yang terpelihara</i>						
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Mebel</i>	2 set		24.690.000	24.490.000	200.000	99,00%
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%		902.882.000	784.137.107	118.744.893	<b>87,00%</b>
X.XX.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Surat Menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman</i>	1800 Surat	- jasa pengiriman surat	20.000.000	6.987.356	13.012.644	35,00%
X.XX.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah tagihan Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar</i>	5 rekening	air, listrik,internet, telepon dan TV kabel	476.994.600	407.076.100	69.918.500	85,00%
X.XX.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia</i>	10 orang/thn	- PHL - petugas kebersihan 5 x 12 - penjaga malam 4 x 12 - satpam - supir 1 x 12	405.887.400	370.073.651	35.813.749	91,00%
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah	100%		657.290.000	577.621.147	79.668.853	88,00%
X.XX.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara</i>	5 unit	pemeliharaan kendaraan dinas	65.000.000	43.630.278	21.369.722	67,00%
X.XX.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	100 unit	komputer dan pemeliharaan elektronik lainnya (honor PPTK, PPBJ)	150.000.000	136.913.500	13.086.500	91,00%
X.XX.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara</i>	3 unit	3 gedung, Taman (100 juta), green house, parkir (honor PPTK, PPBJ)	302.290.000	295.953.413	6.336.587	98,00%
X.XX.01.2.09.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara</i>	100%	AC, Genset, Mebel, Filling Kabinet dan meja	140.000.000	101.123.956	38.876.044	72,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen tase
2.11.02	III. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen RPPLH yang terselenggara secara efektif	100%		1.280.240.000	1.223.190.075	57.049.925	96,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dokumen		979.380.000	922.330.075	57.049.925	94,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dokumen terkait lainnya yang tersedia	4 dok	1. dokumen Pembaharuan RPPLH di DLH (Rp. 277.520.000)	979.380.000	922.330.075	57.049.925	94,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	dokumen		300.860.000	300.860.000	-	100,00
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang tersedia	1 dok	dokumen KLHS Tata Ruang	300.860.000	300.860.000	-	100,00
2.11.03	IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%		6.343.550.200	5.813.454.600	530.095.600	92,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	100%		6.113.500.200	5.679.032.600	434.467.600	93,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen laporan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia	8 laporan	1. Pengujian Kualitas Udara Roadside (1 tahun) Rp. 163.059.000	1.323.276.200	1.014.037.100	309.239.100	77,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi & Pelaksanaan Pengendalian Emisi GRK, Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah laporan Inventarisasi gas Rumah kaca (GRK) yang tersedia	1 Laporan	1. Tersusunnya Kajian Emisi Gas Rumah Kaca Rp. 352.710.000	639.524.000	591.636.500	47.887.500	93,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan dikelola dengan baik dan memadai	2 unit	pengadaan AQMS 2 unit Rp. 2 m x 2 = Rp. 4 m	4.150.700.000	4.073.359.000	77.341.000	98,00

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen tase
2.11.01.2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Ditanggulangi			113.340.000	82.972.000	30.368.000	73,00
2.11.03.2.02.01	<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH pada Masyarakat</i>	<i>Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat yang dilaksanakan</i>	3 Kegiatan	<i>Terselenggaranya Forum Group Discussion (FGD) di bidang LH di Kota Medan</i>	113.340.000	82.972.000	30.368.000	73,00
2.11.03.2.03	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota</b>	Terpuhikannya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	kasus		116.710.000	51.450.000	65.260.000	44,00
2.11.03.2.03.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>	<i>Jumlah pencemaran yang berhasil dihentikan dari sumbernya</i>	150 kasus	<i>identifikasi pelaku usaha / kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup</i>	116.710.000	51.450.000	65.260.000	44,00
<b>2.11.04</b>	<b>V. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>196.789.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>193.589.000</b>	<b>2,00</b>
2.11.04.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Luas taman Keanekaragaman hayati yang dikelola dengan baik	Ha		94.588.385.339	81.713.727.632	193.589.000	2,00
2.11.04.2.01.02	<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>	<i>Jumlah lokasi taman keanekaragaman hayati yang dikelola dengan baik</i>	1 ha	<i>Implementasi/dukungan penghijauan pd kaw. lindung &amp; lahan kritis/ sempadan sungai</i>	196.789.000	3.200.000	193.589.000	2,00
<b>2.11.06</b>	<b>VI. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>100%</b>		<b>133.648.000</b>	<b>116.284.000</b>	<b>17.364.000</b>	<b>87,00</b>
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	cakupan pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	%		133.648.000	116.284.000	17.364.000	87,00
2.11.05.2.01.01	<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3</i>	10 sampel		99.058.000	95.774.000	3.284.000	97,00
<b>2.11.06</b>	<b>VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan izin</b>	<b>100%</b>		<b>327.371.000</b>	<b>153.110.000</b>	<b>174.261.000</b>	<b>47,00</b>

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen tase
	<b>TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH</b>	<b>Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)aan</b>						
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	100%		327.371.000	153.110.000	174.261.000	47,00
2.11.06.2.01.01	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	<i>Jumlah Verifikasi persetujuan teknis SLO (Surat kelayakan Operasional)</i>	100 SLO	1. verifikasi persetujuan teknis SLO (100 rekom) Rp 100.000.000	192.871.000	66.410.000	126.461.000	34,00
2.11.06.2.01.02	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	<i>Jumlah usaha atau kegiatan yang diawasi oleh Pemerintah Kota yang diawasi</i>	200 pelaku usaha	<i>pengawasan/ laporan semester</i>	113.500.000	76.350.000	37.150.000	67,00
2.11.06.2.01.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>	<i>Jumlah sanksi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan dan penerapan upaya dan rencana RPPLH</i>	25 sanksi	sanksi Administratif	21.000.000	10.350.000	10.650.000	49,00
<b>2.11.08</b>	<b>VIII. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat</b>	<b>100%</b>		<b>113.380.000</b>	<b>103.274.000</b>	<b>10.106.000</b>	<b>91,00</b>
2.11.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kali		113.380.000	103.274.000	10.106.000	<b>91,00</b>
2.11.08.2.01.02	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang difasilitasi</i>	5 kali	<i>Fasilitas Dukungan Bidang Lingkungan Hidup</i>	51.690.000	48.755.000	2.935.000	94,00
<b>2.11.09</b>	<b>IX. PROGRAM PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>100%</b>		<b>255.992.000</b>	<b>243.086.500</b>	<b>12.905.500</b>	<b>95,00</b>

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output dan Sub Kegiatan	Target	Ruang Lingkup Pekerjaan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persen tase
2.11.09.2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			255.992.000	243.086.500	12.905.500	<b>95,00</b>
2.11.09.2.01.01	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan</i>	200 sekolah	1. Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)	255.992.000	243.086.500	12.905.500	95,00
<b>2.11.10</b>	<b>X. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>		<b>20.000.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>95,00</b>
2.11.10.2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota</b>	Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	100%		20.000.000	18.900.000	1.100.000	<b>95,00</b>
2.11.10.2.01.01	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota</i>	<i>Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani</i>	50 pengaduan	<i>Pengaduan SPPD Dalam Daerah</i>	20.000.000	18.900.000	1.100.000	95,00
<b>2.11.11</b>	<b>XI. PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan sampah</b>	<b>100%</b>		22.287.345.068	20.466.839.524	1.545.506.544	<b>0,93</b>
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Jumlah kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah	Dokumen		22.287.345.068	20.466.839.524	1.545.506.544	0,93
2.11.11.2.01.01	<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang tersedia</i>	1 dokumen	<i>Pelaksanaan Program-Program Jakstrada Kota Medan dan Adipura</i>	536.290.000	474.438.000	61.852.000	88,00
	<b>Jumlah</b>				<b>23.015.149.329</b>	<b>20.718.281.346</b>	<b>2.296.867.983</b>	<b>90,02</b>

**TABEL II. 2 TC. 29**  
**EVALUASI RENCANA KERJA {RENJA} OPD**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2022**

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target KinerjaKine rjaCapaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2022) (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun Kegiatan	
					Target Renja tahun2022 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan (th 2023) n-1 (TW II)	Tingkat capaian Realisasi target
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Persentase volume sampah yang terkelola							0	
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Timbulan sampah yang terkelola</b>							0	
	<i>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>							330.0000	
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemda</b>	100%		100%	91%	91%	100%	50%	72,75%

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia</b>	12 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	87%	1 dokumen		71,75%
		Jumlah dokumen/ laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yg tersedia							2 dokumen	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia</i>	7 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	87%	1 dokumen	2 dokumen	71,75%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>							1 dokumen	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>							1 laporan	
	<b>Administrasi, Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Administrasi, Keuangan, Perangkat Daerah Yang Tersedia</b>	100%	100%	100%	96%	96%	100%	65%	74%
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan</i>	421 orang	71 orang	71 orang	71 orang	96%	71 orang	65 orang	74%
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>							1 dokumen	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersedia</b>	75%	85%	100%	70%	70%	27 laporan	15%	67,5%
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah ASN dan Pegawai Lainnya di Perangkat Daerah Yang Diberikan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i>	790 orang	140 stel	164 stel	146 stel	74%	142 stel		68,5%

	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang Tersedia</i>	929 Stel	140 stel	164 stel	146 stel	78%	142 stel		69,5%
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>							0	
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan</i>	205 orang	12 orang	10 orang	10 orang	100%	25 orang		75%
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>							2 Oorang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan administrasi umum Perangkat daerah yang Tersedia</b>	6%	100%	1/901	1/671	64%	1 tahun	25 %	66%
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	5 tahun	1 tahun	100%	32%	32%	1 tahun	0	58%
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>	6 tahun	1 tahun	100%	90%	90%	1 tahun	1 paket	72,5%
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	6 tahun	1 tahun	100%	75%	75%	1 tahun	1 paket	68,75%
	<i>Penyediaan Barang Cetak &amp; Penggandaan</i>	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan</i>	6 tahun	1 tahun	100%	99%	99%	1 tahun	2 paket	74,75%
	<i>Penyediaan bahan /material</i>	<i>Jumlah paket bahan/material yang disediakan</i>	23 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	99%	3 laporan	1 paket	74,75%
	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	130 orang	12 bulan	300 orang	285 orang	88%	600 orang	15 laporan	72%
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia</i>	500 kali	8 kali	45	0	0%	1 tahun		50%
		<i>Jumlah makan minum Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan</i>	335 kali		100	68	54%	1 tahun		63,5%

		<i>Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti</i>	360 kali		48	37	54%	1 tahun		63,5%
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>							69 laporan	
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>							0	
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang terkelola dengan baik</i>	24 aplikasi	4 aplikasi	4	3	99%	1 tahun		74,75%
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>							1 dokumen	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian barang milik daerah guna menunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah yang terpelihara</b>	7 kegiatan	100%	100	92%	92%	100%		73%
	<i>Pengadaan Sarana &amp; Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli</i>	200 unit/jenis	1 tahun	100	92%	92%	100%		73%
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>							10 unit	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>							8 unit	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>							1 unit	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2 unit	
3.	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Ketersediaan dokumen RPPLH yang terselenggara secara efektif</b>	100%	10%	100%	100%	100%	100%	45%	52,50%
	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia</b>	1 dokumen	100%	5 dokumen	100%	100%	100%	4 dokumen	75%
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia	21 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	75%
	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota</b>	<b>Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai</b>	100%	-	1 dokumen	100%	100%	100%	0	50%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersedia	4 dokumen	-	1 dokumen	100%	100%	2 dokumen	0	50%
4.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	100%	75%	100%	92%	92%	100%		66,75%
		<b>Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</b>							14.5 %	
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia</b>	100%	75%	11	6	93%	13 laporan	1 laporan	67%

	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	<i>Jumlah Dokumen laporan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia</i>	12 laporan	2 laporan	6 laporan	6 laporan	77%	9 laporan		69,25%
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>							1 dokumen	
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Emisi Gas</i>	<i>Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia</i>	5 laporan	-	1 laporan	93%	93%	1 laporan		48,25%
	<i>Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	5 laporan	-	1	93%	93%	1 laporan		48,2%
		<i>Jumlah laporan kegiatan kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terlaksana</i>	5 laporan	1 laporan	1 laporan	0%	0%	1 laporan		25%
		<i>Jumlah peserta sosialisasi energi terbarukan untuk rumah tangga</i>	200 orang	200 orang	-	-	-	1 laporan		50%
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>							1 dokumen	
	<i>Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan dikelola dengan baik dan memadai</i>	8 unit	-	2	98%	98%	8 unit		49,5%

		<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</i>							1 dokumen	
	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Ditanggulangi</b>	75%	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	73%	7 laporan	0	68,25%
	<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</i>	<i>Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat yang dilaksanakan</i>	16 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan		75%
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota</b>	<b>Terpulihkannya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup</b>	75%	100%	150 kasus	132 kasus	88%	9 laporan		40,32%
		<b>Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</b>							20%	
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>	<i>Jumlah pencemaran yang berhasil dihentikan dari sumbernya</i>	755 kasus	144 kasus	150 kasus	132 kasus	88%	10 laporan		44,35%
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yg Dilaksanakan</i>							0	
5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	50%	50%	100%	0%	50%	100%		37,5%
		<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>							13	

	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lokasi taman keanekaragaman hayati yang di kelola</b>	10 hektar	50%	2 ha	0%	50%	100%		11,29%
		<b>Luas Taman Keanekaragam Hayati yg dikelola dgn baik</b>							1 Ha	
	<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>	<i>Jumlah lokasi taman keanekaragaman hayati yang dikelola dengan baik</i>	2 hektar	0%	2 ha	0%	0%	4 ha		0,05%
	<i>Pengembangan Kap. Kelembagaan dan SDM dlm Pengelolaan Keane ka ragaman Hayati</i>	<i>Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang dibina untk pengelolaan keanekaragaman hayati</i>	250 orang	50 sekolah		50%				
		<i>Jumlah orang yang mening kat Kapasitasnya dalam Penge lolaan Keanekaragaman Hayati</i>							50	
	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							0	
6.	<b>PROGRAM PENGENDA LIAN BAHAN BERBAHA YA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	100%	0%	100%	87%	87%	11 laporan	15 %	46,75%
	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>cakupan pengendalian penyimpan an sementaramlimbah B3</b>	75%	0%	20 laporan	87 laporan	87%	12 laporan	5%	46,75%
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyim panan Sementara Lim bah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayan an Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah laporan rincian teknik penyimpanan &amp; pengumpulan skala LB3 di Kota Medan</i>	80%	-	10 laporan	36 laporan	59%	13 laporan		64,75%
	<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyarat</i>	<i>Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3</i>	250 sampel	0%	10 sampel	10 sampel	97%	14 laporan		49,25%

	<i>an Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>									
7.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN (PPLH)</b>	<b>Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</b>	100%	100%	100%	48%	48%	100%	35	62%
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota</b>	<b>Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</b>	100%	141%	1/517	247/247	100%	360/360	35	85,2%
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	<i>Jumlah verifikasi persetujuan teknis SLO (Surat Kelayakan Operasional)</i>	500 SLO	50 SLO	100 SLO	41 SLO	100%	30 dokumen		75%
		<i>Jumlah persetujuan lingkungan an hidup yang diterbitkan</i>	1262 dokumen	235 dokumen	192 dokumen	200 dokumen	104%	80 dokumen		76%
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>							3 dokumen	
	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota</i>	<i>Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi oleh pemerintahan Kota</i>	1200 pelaku usaha	85 pelaku usaha	200 pelaku usaha	200 pelaku usaha	100%	200 pelaku usaha		75%
		<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin</i>							87 laporan	

		<i>Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>								
	<i>Koordinasi &amp; Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>	<i>Jumlah sanksi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan dan penerapan upaya dan rencana PPLH</i>	125 sanksi	-	25 sanksi	48 sanksi	192%	50 sanksi	-	73%
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi &amp; Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD</i>							16 dokumen	
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	100%	60%	8 laporan	5 laporan	91%	15 laporan	20%	62,75%
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	6 kali	60%	8 laporan	5 laporan	91%	16 laporan	0	62,75%
	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>							5 lembaga	
	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang difasilitasi</i>	26 kali	3 kali	5 kali	3 kali	94%	17 laporan		73,5%
	<i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH</i>	<i>Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terselenggara</i>	13 kali	2 kali	3 kali	2 kali	88%	18 laporan		72%
		<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>							1.450 orang	
9.	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LH UTK MASYARAKAT</b>	<b>Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan Hidup</b>	100%	100%	200	200	95%	19 laporan	25%	73,5%

	<b>Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	5 kali	200	200	200	95%	20 laporan	3 kali	73,5%
	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan &amp; Pengelolaan LH</i>	<i>Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha /Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan &amp; Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan</i>	1300 lembaga	200 sekolah	200 sekolah	200 sekolah	95%	400 sekolah	300 entitas	73,5%
10.	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kab/Kota</b>	100%	96%	25 pengaduan	19 pengaduan	95%	100%	40%	72,75%
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kab/Kota</b>	<b>Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	100%	96%	25 pengaduan	19 pengaduan	95%	100%	40 %	72,75%
11.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH</b>	<b>Persentase kebijakan/regulasi/stra tegi pengelolaan persampahan yang tersedia</b>	100%	0%	100%	0%	88%	100%		47%
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah</b>	5 dokumen	0%	1 dokumen	88%	88%	100%		47%
	<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota</i>	<i>Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaansampah yang tersedia</i>	5 dokumen		1 dokumen	88%	88%	1 dokumen		47%

**TABEL II.3 TC. 30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2022**

No.	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah (n-2)		Realisasi Capaian Tahun 2023 (n-1) TW II (Rp)	Proyeksi		Catan Analisis
			Tahun 2022 tahun (n-2) Rp	Tahun 2023 tahun (n-1) Rp		Tahun 2024 Rp	Tahun 2025 Rp	
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM &amp; PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan	133.648.000	3.388.646.984	0	4.226.335.000	4.114.650.000	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	133.648.000	3.388.646.984	0	4.226.335.000	4.114.650.000	
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	99.058.000	665.000.000	0	750.000.000	804.650.000	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	113.380.000	1.000.000.000	0	800.000.000	1.210.000.000	
	Rehabilitasi TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	113.380.000	1.723.646.984	0	1.565.285.000	1.000.000.000	
		Jumlah RT yg terlayani peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS				1.111.050.000	1.100.000.000	
2.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia		77.795.247.216	27.251.721.298	80.298.467.313	109.616.635.394	

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia		172.678.950	152.105.100	262.500.000	80.000.000	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		70.350.000	52.815.600	262.500.000	80.000.000	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		3,039,450				
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		99,289,500	99,289,500			
	<b>Administrasi, Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia		19.226.544.647	9.607.277.963	19.415.595.197	19.500.000.000	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		19.223.505.197	9.607.277.963	19.415.595.197	19.500.000.000	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		3,039,450	0			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia		287.020.800	8.000.000	590.451.100	225.000.000	
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>		111.376.800	0			
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		63.144.000	0	196.841.100	75.000.000	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tupoksi</i>	<i>Jumlah Pegawai berdasarkan Tupoksi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				248.610.000,00	0	
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		112.500.000	8.000.000	145.000.000	150.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia		24.410.905.408	10.603.296.256			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34.217.550	0	26.695.775	45.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	352.800.692	172.271.667	68.481.640	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22.125.465.515	9.432.547.752	21.999.953.426	25.000.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	851.394.465	792.204.000	290.161.840	945.000.000	
	penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	62.445.000	5.772.000	62.445.000	68.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.790.000	5.685.500	67.200.000	65.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.535.000	124.815.337	919.437.000	590.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24,275,300	0	240.000.000	230.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	210.000.000	70.000.000			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	22.222.813.750	6.065.100.000			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	103.818.750	0	222.559.585	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	138,830,000	0			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenda raan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9,189,254,800	266,282,729			

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		:269,820,400	90,520,057			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		484,939,725	149,053,770			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		232,680,000				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>		1.117.518.736	284.493.423	1.063.748.336	1.673.277.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		25.000.000	8.139.000	5.000.000	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		647.371.336	92.217.606	334.770.936	670.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		445.147.400	184.136.817	723.977.400	973.277.400	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>		10.315.524.925	517.726.556	10.727.103.508	12.380.569.725	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		103,818,750	0			
	Pengadaan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				24.186.568.226	48.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		138.830.000	0	205.770.000	172.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9,189,254,800	266,282,729	9.613.760.000	11.270.650.000	
	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		269.820.400	90.520.057	306.850.000	270.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		484.939.725	149.053.770	471.163.508	484.939.725	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		232,680,000	11,870,000	129.560.000	182.680.000	
	<b>Penaatan Organisasi</b>	<b>Persentase Cakupan Penataan Organisasi</b>		<b>42.240.000</b>	<b>13.722.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		42.240.000	13.722.000	80.000.000	50.000.000	
3.	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif</b>	<b>1.280.240.000</b>	<b>1.357.061.160</b>	<b>227.910.000</b>	<b>956.006.200</b>	<b>820.269.725</b>	
		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	979.380.000	889.294.680	227.910.000	956.006.200	820.269.725	
		Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia	979.380.000	889.294.680	227.910.000			
		<b>Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai</b>	300.860.000	<b>467.766.480</b>	<b>0</b>	<b>592.480.000</b>	<b>0</b>	
		Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang tersedia	300.860.000	467.766.480	0	592.480.000	0	
4.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	10.087.723.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.328.133.320</b>	<b>7.343.675.230</b>	
		Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	10.086.223.000	<b>3.490.904.521</b>	<b>111.805.000</b>	<b>5.328.133.320</b>	<b>7.343.675.230</b>	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	1.500.000	3.258.145.132	111.805.000	5.073.408.320	6.971.545.505	

	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	<i>Jumlah Dokumen laporan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara &amp; TPA yg tersedia</i>	388.825.112	0	0	1.619.114.280	2.251.685.780
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	131.490.000	1.973.844.268	91.405.000	1.619.114.280	2.251.685.780
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanan Pengendalian Emisi Gas</i>	<i>Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia</i>	155.245.112	0	0	579.498.140	1.000.000.000
	<i>Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan dan Adaptasi Perubahan</i>	102.090.000	0	0		
		<i>Jumlah laporan kegiatan kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terlaksana</i>	1.251.989.217	0	0		
		<i>Jumlah peserta sosialisasi energi terbarukan untuk rumah tangga</i>	30.000.000	0	0		
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	111.498.780	937.103.600	0		
	<i>Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan terkelola dengan baik dan memadai</i>	50.000.000	0	0	2.874.795.900	3.719.859.725
		<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</i>	30.000.000	347.197.264	20.400.000	2.874.795.900	3.719.859.725

	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Ditanggulangi</b>		231.239.664	0	249.525.000	312.129.725
	<i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pd Masyarakat</i>	<i>Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat yang dilaksanakan</i>	23.350.000	0	0	249.525.000	312.129.725
		<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	240.000.000	231.239.664	0	249.525.000	312.129.725
	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpulihkannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	385.557.800	0	0	5.200.000	60.000.000
		<b>Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</b>	385.557.800	1.519.725	0	5.200.000	60.000.000
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>	<i>Jumlah pencemaran yang berhasil dihentikan dari sumbernya</i>	24.690.000	0	0	5.200.000	60.000.000
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i>	902.882.000	1.519.725			
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati</b>	6.343.550.200	0	0	1.110.153.560	511.000.000
		<b>Indeks kualitas tutupan lahan</b>	6.113.500.200	240.719.656	3.200.000	1.110.153.560	511.000.000
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lokasi taman keanekaragaman hayati yang di kelola</b>	1.323.276.200	0	0	1.110.153.560	511.000.000
		<b>Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik</b>	639.524.000	240.719.656	3.200.000	1.110.153.560	511.000.000

	<i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i>	<i>Jumlah lokasi taman keanekaragaman hayati yang dikelola dengan baik</i>	4.150.700.000	0	0	850.000.000	200.000.000	
		<i>Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	113.340.000	194.071.096	3.200.000	850.000.000	200.000.000	
	<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	<i>Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang dibina untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</i>	113.340.000	0	0	59.673.560	61.000.000	
		<i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	116.710.000	46.648.560	0			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase lokasi RTH publik yang dikelola dengan baik</b>	116.710.000	200,000,000	0			
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase RTH yang ditangani</b>	196.789.000	200,000,000	0			
	<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	94.588.385.339	200,000,000	0	200.480.000	250.000.000	
6.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Usahadan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	20.000.000	261.457.360	0	257.700.000	425.000.000	
	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>cakupan pengendalian penyimpanan sementara limbah B3</b>	476.994.600	261.457.360	0	257.700.000	425.000.000	
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah laporan rincian teknik penyimpanan &amp; pengumpulan skala LB3 di Kota Medan</i>	405.887.400	34.500.000	0	51.500.000	175.000.000	
	<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	<i>Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3</i>	657.290.000	226.957.360	0	206.200.000	250.000.000	

7.	<b>PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</b>	196.789.000	30.5.509.175	0	560.177.760	799.647.340
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota</b>	<b>Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha /persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</b>	327.371.000	305.509.175	0	560.177.760	799.647.340
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	<i>Jumlah verifikasi persetujuan teknis SLO (Surat Kelayakan Operasional)</i>	327.371.000	0	0	176.152.380	320.000.000
		<i>Jumlah persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan</i>	192.871.000	0	0		
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	113.500.000	301.861.835	0		
	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota</i>	<i>jumlah usaha/kegiatan yang diawasi oleh pemerintahan Kota</i>	21.000.000	0	0		
		<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	20.000.000	1.823.670	0	378.825.380	239.823.670
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>	<i>Jumlah sanksi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan dan penerapan upaya dan rencana PPLH</i>	20.000.000	0	0	378.825.380	239.823.670
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>	20.000.000	1.823.670	0		

8.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase Lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	65.000.000	1.904.567.635	133.382.400	1.069.527.139	1.155.562.816	
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	1.904.567.635	133.382.400	1.069.527.139	1.155.562.816	
	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i>	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	302.290.000	37,500,000	0	37.500.000,00	100.000.000	
	<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang difasilitasi	140.000.000	0	0	271.210.234	655.562.816	
		<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	13.329.903.449	955.947.797	133.382.400			
	<i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i>	Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terselenggara	13.329.903.449	0	0			
		<i>Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>	23.015.149.329	911.119.838	0			
9.	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan Hidup		584.094.860	154.993.000	341.921.960	636.254.840	
	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		584.094.860	154.993.000	341.921.960	636.254.840	

	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan</i>		0	0	341.921.960	636.254.840	
		<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai iKinerjanya dalam rangka PPLH</i>		584.094.860	154.993.000			
10.	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	56.242.000	607.890	0	97.107.120	137.823.670	
	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	54.742.000	607.890	0	97.107.120	137.823.670	
	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani</i>	1.500.000	607.890	0	97.107.120	137.823.670	
11.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH</b>	<b>Persentase kebijakan/ regulasi/ strategi pengelolaan persampahan yang tersedia</b>	22.287.345.068	0	0	11.114.574.540	10.737.566.540	
	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah</b>	22.287.345.068	0	0	11.114.574.540	10.737.566.540	
	<b>Penyusunan Kebijakan &amp; Strategi Daerah Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang tersedia</b>	536.290.000	0	0			

Kab/Kota							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase volume sampah yang terkelola</b>	<i>51.690.000</i>	1.699.142.000	138.397.180	<b>378.150.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Timbulan sampah yang terkelola</b>	<i>61.690.000</i>	<b>1.699.142.000</b>	<b>138.397.180</b>			
<i>Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	<b>255.992.000</b>	<i>6,916,563,540</i>	<i>2,881,901,475</i>	<b>7.162.803.540</b>	<b>6.916.563.540</b>	
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kab/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota. Pengelolaan Persampahan Jakstrada</i>	<i>255.992.000</i>	<i>3,473,545,464</i>	<b>0</b>			
<i>Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>	<i>255.992.000</i>	<i>290,000,000</i>	<b>0</b>	<b>2.350.118.000</b>	<b>1.705.438.000</b>	
<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	<b>13.807.889.129</b>	<i>1,409,142,000</i>	<i>138,397,180</i>	<b>1.223.503.000</b>	<b>1.815.565.000</b>	
<i>Total</i>		<b>50.842.790.120</b>	<b>109.323.105.037</b>		<b>105.360.103.912</b>		

**TABEL II.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipasif	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	61,89 14	62 14%
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan Yang Dikelola Di TPA	49,34	72%
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah Atau Pengelolaan Persampahan Di Tingkat Rumah Tangga	5,16	28%

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 3.490.904.521
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 305.509.175
3.	Program Perhargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 584.094.860
4.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.357.061.160
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 440.719.656
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 (Limbah B3)	Rp. 261.457.360
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 1.904.567.635
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 607.890
9.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 3.388.646.984
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 12.089.251.004

**TABEL II.5**  
**PENJELASAN RUMUSAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Formula Perhitungan :  $IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$ $IKLH = 61.89$  Baseline : Nilai 61,89	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota berdasarkan surat edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, pembobotan IKLH Kabupaten/Kota adalah : $IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$  1. Untuk IKA (Indeks Kualitas Air), data diambil dari pemantauan sungai yang ada di Kota Medan 2. Untuk IKU (Indeks Kualitas Udara) data diambil dari : Pengujian Kualitas Udara Ambient. 3. Untuk IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dari data tutupan lahan  <p style="text-align: center;"><b>Tabel Kategori IKLH Periode 2020 – 2024</b></p>
			Katagori IKLH : Sangat Baik (IKLH > 80)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
			Baik ( $70 < \text{IKLH} \leq 80$ ) Cukup Baik ( $60 < \text{IKLH} \leq 70$ ) Kurang Baik ( $50 < \text{IKLH} \leq 60$ ) Sangat Kurang Baik ( $40 < \text{IKLH} \leq 50$ ) Waspada ( $30 < \text{IKLH} \leq 40$ )
2.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Tersedia	Formula Perhitungan :  Persentase Penurunan Emisi GRK  $= \frac{\text{Total CO}_2\text{eq(ton)}}{\text{Rencana Aksi Mitigasi}} \times 100\%$ Proyeksi Emisi CO <sub>2</sub> eq (ton)  = 14 %	Target penurunan terdiri dari 5 sektor prioritas :  1. Energi (Industri energi dan transportasi) 2. AFOLU (Peternakan, perubahan lahan dan pertanian)  3. IPPU (Industri dan penggunaan pupuk)  4. Pengelolaan Limbah 5. Kehutanan dan lainnya
		Baeseline : Nilai 14.34%	

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
3.	Persentase Penanganan Persampahan Yang Dikelola Di TPA	Formula Perhitungan : $= \frac{\text{Jumlah Tonase Sampah yang Diangkut \& Dikelola di TPA}}{\text{Jumlah Total Tonase Sampah yang Diproduksi}} \times 100\%$ = 73 % Baseline : Nilai 49.34%	1) Prediksi produksi sampah kota Medan tahun 2023 = $2.460.858 \text{ jiwa} \times 0,7 \text{ kg /hari} = 1.722.601 \text{ kg/hari} = 1.723 \text{ Ton / hari}$ 2) 73% dari produksi sampah atau 1.258 ton /hari kota Medan ditargetkan terangkut dan dikelola di TPA Hasil analisis JICA (2012) tentang komposisi limbah padat / sampah perkotaan kota Medan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>* Makanan 48%</li> <li>* Kertas, kardus &amp; popok 17%</li> <li>* Plastik 14%</li> <li>* Kayu &amp; Sampah Taman 5%</li> <li>* Logam 1%</li> <li>* Karet &amp; kulit 2 %</li> <li>* Pakaian &amp; kain 4%</li> <li>* Kaca 1%</li> <li>* Lain-lain 8%</li> </ul>
			Penanganan sampah meliputi kegiatan yang melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA kota Medan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
4.	Persentase Pengurangan Sampah Atau Pengelolaan Persampahan Di Tingkat Rumah Tangga	Formula Perhitungan :  $= \frac{\text{Jumlah Tonase Pengurangan Sampah di Lingkungan}}{\text{Jumlah Total Tonase Sampah yang Diproduksi}} \times 100\%$  = 27 %  Baseline : Bilai 5.16 %	1) 27% dari produksi sampah atau 465 ton sampah / hari kota Medan ditargetkan dikelola di tingkat rumah tangga pada lingkungan masyarakat sebagai upaya pengurangan sampah.  2) Pengurangan sampah 27% di lingkungan masyarakat dengan estimasi peran serta / partisipasi dari yaitu : * Botot 58 % * Bank Sampah 25% * TPS / TPS-3R 10% * Pusat Daur Ulang (PDU) 5% * Pengelolaan Maggot 5% * Lain-lain 2%  Pengurangan sampah meliputi kegiatan dengan melakukan pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah

TABEL II.6  
PRESENTASI (%) PROGRAM YANG TEREALISASI TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	JUMLAH PERSENTASE REALISASI PROGRAM 2022		
		PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	13.329.903.449	10.868.531.750	81.53
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.807.149.129	12.569.343.271	91.03
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.280.240.000	1.223.190.975	95.54
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.343.550.270	5.813.454.600	91.64
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	94.588.387.339	81.710.527.632	86.38
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	133.648.000	116.284.000	87.01
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	327.371.000	153.110.000	46.77
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	113.380.000	103.274.000	91.09
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	255.992.000	243.086.500	94.96
10.	Program Lingkungan Hidup	20.000.000	18.900.000	94.50
11.	Program Pengelolaan Persampahan	22.287.345.068	20.466.839.524	0.93
<b>TOTAL</b>		<b>152.486.966.255</b>	<b>133.286.542.252</b>	

**TABEL II.7**  
**CAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN TARGET DALAM DOKUMEN**  
**TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>100%</b>	<b>81,53</b>	<b>82</b>	<b>Tercapai</b>
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,53	82	Sangat Tercapai
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	61,24	61	Tercapai
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100%	100%	100	Sangat tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat tercapai
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat tercapai
	Administrasi, Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71 orang/bulan	71 orang/bulan	100	Sangat tercapai

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KI NER JA (%)	KATEGORI
	<i>Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat tercapai
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	144 Stell	<i>Pakaian batik (72 stel), pakaian Seragam Putih (72 Stel)</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	144 stell	<i>- pakaian dinas (72 stell) pakaian lapangan (72 Stell)</i>	100	Sangat tercapai
		20 stell	<i>pakaian lapangan cs 20 stell</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang/thn	<i>- biaya kontribusi pelatihan 10 x Rp.8.000.000</i>	100	Sangat tercapai
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	100%	<i>- lampu, kabel dsb 100%</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	100%	<i>- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, peralatan dan bahan lainnya 100%</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	100%	<i>- ATK, BBM Genset dan bahan pos 100%</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	100%	<i>Cetakan</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	30 kali	<i>1 kali kunjungan Rp. 1.000.000,- 100%</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	30 Kali		100	Sangat tercapai

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KI NER JA (%)	KATEGORI
		100 kali	SPPD Luar Daerah (30 x Rp. 12.000.000) (10 x utk bintek)	100	Sangat tercapai
		40 kali	100%	100	Sangat tercapai
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 laporan	100%	100	Sangat tercapai
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 aplikasi	- belanja jasa tenaga ahli 4 x 12 pengelola - dsb	100	Sangat tercapai
	penyediaan bahan /material	3 kegiatan	fasilitas penyelenggaraan HUT RI Rp.	100	Sangat tercapai
		4 aplikasi	fasilitas penyelenggaraan HUT Kota Medan	100	Sangat tercapai
		3 kegiatan	fasilitas penyelenggaraan hari2 besar lainnya	100	Sangat tercapai
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	20 laptop, 10 printer. 10 scanner + AC 2 Unit utl lab	100	Sangat tercapai
	Pengadaan Mebel	2 set	100%	100	Sangat tercapai
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Surat	- jasa pengiriman surat	100	Sangat tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 rekening	air, listrik,internet, telepon dan TV kabel	100	Sangat tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 orang/thn	- PHL - petugas kebersihan - penjaga malam satpam	100	Sangat tercapai

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KI NER JA (%)	KATEGORI
			- supir 1 x 12		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	5 unit	<i>pemeliharaan kendaraan dinas</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 unit	<i>komputer dan pemeliharaan elektronik lainnya</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	3 unit	<i>3 gedung, Taman (100 juta), green house, parkir</i>	100	Sangat tercapai
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100%	<i>AC, Genset, Mebel, Filling Kabinet dan meja</i>	100	Sangat tercapai
	<b>Penaatan Organisasi</b>	100%			
	<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	40 kali	<i>Olah raga (senam &amp; Goes)</i>	100	Sangat tercapai
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1.	<i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Sangat tercapai
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
2.1	<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat tercapai
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KI NER JA (%)	KATEGORI
<b>1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 Laporan	8 Laporan	100	Sangat tercapai
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 Laporan	3 Laporan	100	Sangat tercapai
1.3	Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	100	Sangat tercapai
<b>2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Sangat tercapai
<b>3</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
3.1	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i>	150 Kasus	150 Kasus	100	Sangat tercapai
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Ha</b>	<b>1 Ha</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1 Ha	1 Ha	100	Sangat tercapai
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KI NER JA (%)	KATEGORI
	<b>BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				
<b>1</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10 Laporan	10 Laporan	100	Sangat tercapai
1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10 Sampel	10 Sampel	100	Sangat tercapai
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	292	321	109	Sangat tercapai
1.2	<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	100	Sangat tercapai
1.3	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i>	25 Sanksi	48 Sanksi	192	Sangat tercapai
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8 Kali</b>	<b>8 Kali</b>	100	Sangat tercapai
1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5 Kali	5 Kali	100	Sangat tercapai

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KI NER JA (%)	KATEGORI
1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	3 Kali	3 Kali	100	Sangat tercapai
<b>IX.</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	200 Sekolah	200 Sekolah	100	Sangat tercapai
<b>X.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	25	25	100	Sangat tercapai
<b>XI.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>Sangat tercapai</b>
1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat tercapai

**TABEL II.8**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2022**

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	13.329.903.449	10.868.531.750	81,53
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	413.358.507.821	396.358.433.551	95,89
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.280.240.000	1.223.190.975	95,54
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	6.343.550.270	5.813.454.600	91,64
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	94.588.387.339	81.710.527.632	86,38
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	133.648.000	116.284.000	87
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	327.371.000	153.110.000	46,77
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	113.380.000	103.274.000	91,09
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	255.992.000	243.086.500	94,96
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	18.900.000	94,5
11.	Program Pengelolaan Persampahan	22.287.345.068	20.466.839.524	91,83
	Total			

Pencapaian kinerja pada aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk pelayanan informasi dan informasi pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat dilihat pada tabel 2.4. Berdasarkan tabel 2.4 tersebut, dapat dilihat bahwa sudah tercapai semua Kinerja pelayanan yang di tetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun tingkat presentase target Volume Kinerja Pelayanan masih belum mencapai optimal sesuai dengan target yang diinginkan.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian belum optimalnya persentase target pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, untuk mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja kurang optimal;
3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang masih belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan;
4. Mekanisme kerja dan koordinasi inter dan intra Bidang dan Sekretariat masih kurang sinergi.

Untuk Tahun 2023 Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan di rencanakan oleh Dinas Lingkungan hidup yaitu 11 Program, 21 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun Program yang prioritas berjumlah 10 program dan 1 program penunjang.

#### **2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

##### **A. Perencanaan Pembangunan Kota Medan**

Kota Medan telah memiliki berbagai produk perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan pokok dalam ketersediaan rencana pembangunan kota ini adalah tingkat sinkronisasi dan keterpaduannya secara hirarkis, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan kota, yang relatif masih lemah sehingga secara implementatif belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berbagai permasalahan pokok dalam penyelenggaraan produk-produk perencanaan pembangunan kota antara lain adalah :

- Masih terbatasnya sumber daya pembangunan yang dapat dikelola dalam pembangunan kota;
- Masih relative rendahnya koordinasi , keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan kota;
- Relatif masih terbatasnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pembinaan, fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kota;

- Terbatasnya dukungan kerangka studi, instrument analisis dan studi lapangan yang dilakukan sebelum menyusun rencana pembangunan kota. Masih terbatasnya wadah dan sarana partisipasi public dalam proses perencanaan pembangunan kota;
- Masih terbatasnya kegiatan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut evaluasi rencana pembangunan kota. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang relatif belum sepenuhnya optimal;
- Masih terbatasnya pendidikan dan latihan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencana.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/pelaku usaha untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Kajian/studi-studi di bidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Medan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
3. koordinasi dan dinamika perubahan. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan mutu kualitas lingkungan.

Untuk Sumber Daya Manusia Aparatur dapat melakukan yaitu:

- a. Mengikuti pendidikan fungsional, kursus dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan TUPOKSI dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan TUPOKSI dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat melakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Teknologi Informatika serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap serta optimasi pemeliharaan;

#### 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan kualitas air sungai serta peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim (emisi gas rumah kaca).

Untuk penanganan isu tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan kegiatan strategis meliputi:

1. Informasi Status Mutu Udara Ambien;
2. Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan; pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
5. Penaatan Lingkungan Perusahaan;
6. Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan;
7. Pengelolaan Limbah B3 (Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3);
8. Pengelolaan Sampah;
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
10. penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
11. penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
12. Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten / Kota);
13. Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra);
14. Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
15. Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
16. Pemantauan Kualitas Lingkungan di (Tempat Pembuangan Akhir) TPA;
17. Penaatan Lingkungan Perusahaan.

#### 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Rancangan awal Renja tahun 2024 untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merencanakan alokasi anggaran belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk pembayaran gaji PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sedangkan untuk Belanja langsung dilaksanakan untuk pelayanan dan pembangunan bidang Lingkungan Hidup. Untuk belanja langsung telah direncanakan 9 program

dengan 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 24.002.478.843. Tabel 2.5 adalah tabel Penetapan Anggaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

## **2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi ataupun dari Perangkat Daerah maupun dari hasil penelitian di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kota. Ada 64 usulan terdiri atas : Musrenbang Kecamatan (14 usulan), FORUM OPD DLH (9 Usulan), Pokok Pikiran DPRD (41 usulan). 64 usulan di atas akan diakomodir pada RKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan melakukan perubahan volume dan pagu pada saat desk OPD.

**TABEL II.9**  
**USULAN MUSRENBANG KECAMATAN KOTA MEDAN**  
**TAHUN 2023**

No	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Lokasi
1.	Penyediaan Becak Sampah	Kecamatan Medan Baru Kecamatan Medan Area
2.	Pelatihan Daur Ulang Sampah	Kecamatan Medan Kota Kecamatan Medan Polonia Kecamatan Medan Perjuangan Kecamatan Medan Tembung Kecamatan Medan Labuhan Kecamatan Medan Timur
3.	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Kecamatan Medan Marelan Kecamatan Medan Deli
4.	Pengadaan Truk dan Bak Aam Roll 6 m <sup>3</sup>	Kecamatan Medan Polonia Kecamatan Medan Perjuangan
5	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Kecamatan Medan Perjuangan
6.	Penyediaan Alat Timbangan Bank Sampah	Kecamatan Medan Baru

Sumber : Hasil Musrenbang Kecamatan 2023

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik hukum dan keamanan.

Untuk Kabupaten/ Kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/ kota. Untuk penyusunan RKPD kabupaten/ kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya ini tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (c) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (e) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, serta (f) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut; (b) Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan

Penggantian Merkuri di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis.

3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Reforestasi Kawasan Hutan; (c) Restorasi Lahan Bekas Tambang; (d) Pemulihan Kualitas Air Sungai Dan Danau; (e) Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (f) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (g) Peningkatan populasi spesies terancam punah di habitat exsitu.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) dirumuskan **VISI: "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif"**

#### **MISI**

##### **1. MEDAN BERKAH**

Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai – Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh Lapisan Masyarakat"

##### **2. MEDAN MAJU**

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern, Terjangkau oleh semua.

##### **3. MEDAN BERSIH**

Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, Profesional, Akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil dan merata.

##### **4. MEDAN MEMBANGUN**

Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.

##### **5. MEDAN KONDUSIF**

Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif bagi segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.

##### **6. MEDAN INOVATIF**

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.

**7. MEDAN BERIDENTITAS**

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, Santun, Harmonis, Toleran dalam Kenajemukan dan Cinta Tanah Air.

**Tabel III.1**  
**Sasaran Tujuan & Misi Beserta Indikatornya**

Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Tujuan	Tujuan	Misi ke IV
Indeks Kualitas Air	Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup	Medan Membangun
Indeks Kualitas Udara				
Indeks Tutupan Lahan				
Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca		

**3.3. Program dan Kegiatan**

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Anggaran tahun berjalan tahun 2023 terbagi 2 yaitu anggaran sebelum perubahan dan anggaran setelah perubahan. Anggaran sebelum Perubahan sebesar Rp. 22.817.087.047 Anggaran sesudah Perubahan Rp. 109.323.105.037

**TABEL III.2**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2023 {TAHUN BERJALAN}**  
**LAMPIRAN**

Formulir RKPA-BELANJA SKPD												
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023												
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup												
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN												
Nomor	Uraian	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)
		T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdu ga	Belanja Trans fer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terdu ga	Belanja Trans fer	Jumlah	
1	6	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0	2.878.646.984	1.146.520.000	0	0	4.025.166.984	4.025.166.984
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	0	0	0	0	2.878.646.984	1.146.520.000	0	0	4.025.166.984	4.025.166.984
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	2.878.646.984	1.146.520.000	0	0	4.025.166.984	4.025.166.984

1.1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	765.000.000	0	0	0	765.000.000	765.000.000
1.2	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	1.723.646.984	0	0	0	1.723.646.984	1.723.646.984
1.4	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	390.000.000	146.520.000	0	0	536.520.000	536.520.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>21.991.467.2 97</b>	<b>825.619.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.817.087.047</b>	<b>68.970.398.278</b>	<b>36.327.539.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.297.938.053</b>	<b>82.480.851.006</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.724.176.3 15</b>	<b>103.818.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.827.995.065</b>	<b>53.824.592.909</b>	<b>32.030.462.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.855.055.888</b>	<b>72.027.060.823</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.389.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.389.450</b>	<b>162.628.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.628.950</b>	<b>89.239.500</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	70.350.000	0	0	0	70.350.000	60.300.000	0	0	0	60.300.000	(10.050.000)

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	3.039.450	0	0	0	3.039.450	3.039.450	0	0	0	3.039.450	0
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	99.289.500	0	0	0	99.289.500	99.289.500
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.306.872.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.306.872.008</b>	<b>18.057.576.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.057.576.784</b>	<b>7.750.704.776</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup)	10.303.832.558	0	0	0	10.303.832.558	18.054.537.334	0	0	0	18.054.537.334	7.750.704.776
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	3.039.450	0	0	0	3.039.450	3.039.450	0	0	0	3.039.450	0
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>591.820.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.820.800</b>	<b>112.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500.000</b>	<b>(479.320.800)</b>
3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dinas Lingkungan Hidup)	111.376.800	0	0	0	111.376.800	0	0	0	0	0	(111.376.800)
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Lingkungan Hidup)	63.144.000	0	0	0	63.144.000	0	0	0	0	0	(63.144.000)
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Lingkungan Hidup)	304.800.000	0	0	0	304.800.000	0	0	0	0	0	(304.800.000)

3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Lingkungan Hidup)	112.500.000	0	0	0	112.500.000	112.500.000	0	0	0	112.500.000	0
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.106.452.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106.452.121</b>	<b>24.350.943.177</b>	<b>116.901.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.467.845.108</b>	<b>23.361.392.987</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	34.217.550	0	0	0	34.217.550	34.217.550	0	0	0	34.217.550	0
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	125.079.955	116.901.931	0	0	241.981.886	241.981.886
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Lingkungan Hidup)	48.041.283	0	0	0	48.041.283	352.800.692	0	0	0	352.800.692	304.759.409
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	110.654.113	0	0	0	110.654.113	g	0	0	0	22.122.848.015	22.012.193.902
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup)	51.493.875	0	0	0	51.493.875	878.226.965	0	0	0	878.226.965	826.733.090
4.6	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Lingkungan Hidup)	62.445.000	0	0	0	62.445.000	62.445.000	0	0	0	62.445.000	0

4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Lingkungan Hidup)	42.790.000	0	0	0	42.790.000	42.790.000	0	0	0	42.790.000	0
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	522.535.000	0	0	0	522.535.000	522.535.000	0	0	0	522.535.000	0
4.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	24.275.300	0	0	0	24.275.300	0	0	0	0	0	(24.275.300)
4.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Lingkungan Hidup)	210.000.000	0	0	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>103.818.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.818.750</b>	<b>0</b>	<b>31.913.561.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.913.561.048</b>	<b>31.809.742.298</b>
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	0	31.163.395.000	0	0	31.163.395.000	31.163.395.000
5.2	Pengadaan Mebel (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0	230.000.000	230.000.000
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	0	103.818.750	0	0	103.818.750	0	520.166.048	0	0	520.166.048	416.347.298
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>700.913.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.913.536</b>	<b>733.032.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.032.798</b>	<b>32.119.262</b>
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup)	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0

6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup)	271.436.136	0	0	0	271.436.136	262.885.398	0	0	0	262.885.398	(8.550.738)
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup)	404.477.400	0	0	0	404.477.400	445.147.400	0	0	0	445.147.400	40.670.000
6.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.488.400	0	0	0	902.488.400	10.365.671.200	0	0	0	10.365.671.200	9.463.182.800
6.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup)	100.410.000	0	0	0	100.410.000	138.830.000	0	0	0	138.830.000	38.420.000
6.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup)	33.470.000	0	0	0	33.470.000	9.189.254.800	0	0	0	9.189.254.800	9.155.784.800
6.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	169.820.400	0	0	0	169.820.400	369.656.400	0	0	0	369.656.400	199.836.000
6.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	466.108.000	0	0	0	466.108.000	492.550.000	0	0	0	492.550.000	26.442.000
6.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup)	132.680.000	0	0	0	132.680.000	175.380.000	0	0	0	175.380.000	42.700.000
7	Uraian Penataan Organisasi	42,240,000	0	0	0	42,240,000	42,240,000	0	0	0	42,240,000	0

7.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dinas Lingkungan Hidup)	42,240,000	0	0	0	42,240,000	42,240,000	0	0	0	42,240,000	0
III	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.710.061.160	0	0	0	1.710.061.160	986.461.160	0	0	0	986.461.160	(723.600.000)
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.242.294.680	0	0	0	1.242.294.680	622.294.680	0	0	0	622.294.680	(620.000.000)
1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	1.242.294.680	0	0	0	1.242.294.680	622.294.680	0	0	0	622.294.680	(620.000.000)
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	467.766.480	0	0	0	467.766.480	364.166.480	0	0	0	364.166.480	(103.600.000)
2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup)	467.766.480	0	0	0	467.766.480	364.166.480	0	0	0	364.166.480	(103.600.000)
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.004.473.246	721.801.000	0	0	3.726.274.246	2.405.303.521	983.281.000	0	0	3.388.584.521	(337.689.725)
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.749.513.857	721.801.000	0	0	3.471.314.857	2.172.544.132	983.281.000	0	0	3.155.825.132	(315.489.725)
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup)	2.108.623.993	69.390.000	0	0	2.178.013.993	1.661.054.268	4.500.000	0	0	1.665.554.268	(512.459.725)

1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)	303.692.600	642.411.000	0	0	946.103.600	343.892.600	642.411.000	0	0	986.303.600	40.200.000
1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	337.197.264	10.000.000	0	0	347.197.264	167.597.264	336.370.000	0	0	503.967.264	156.770.000
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	231.239.664	0	0	0	231.239.664	231.239.664	0	0	0	231.239.664	0
2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup)	231.239.664	0	0	0	231.239.664	231.239.664	0	0	0	231.239.664	0
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23.719.725	0	0	0	23.719.725	1.519.725	0	0	0	1.519.725	(22.200.000)
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran (Dinas Lingkungan Hidup)	23.719.725	0	0	0	23.719.725	1.519.725	0	0	0	1.519.725	(22.200.000)
v	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	249.719.656	0	0	0	249.719.656	145.848.560	200.000.000	0	0	345.848.560	96.128.904
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	249.719.656	0	0	0	249.719.656	145.848.560	200.000.000	0	0	345.848.560	96.128.904
1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (Dinas Lingkungan Hidup)	201.271.096	0	0	0	201.271.096	100.000.000	0	0	0	100.000.000	(101.271.096)

1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000
1.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup)	48.448.560	0	0	0	48.448.560	45.848.560	0	0	0	45.848.560	(2.600.000)
VI	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	293.457.360	0	0	0	293.457.360	214.457.360	0	0	0	214.457.360	(79.000.000)
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	293.457.360	0	0	0	293.457.360	214.457.360	0	0	0	214.457.360	(79.000.000)
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Lingkungan Hidup)	59.500.000	0	0	0	59.500.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(48.500.000)
1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 (Dinas Lingkungan Hidup)	233.957.360	0	0	0	233.957.360	203.457.360	0	0	0	203.457.360	(30.500.000)
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	437.509.175	0	0	0	437.509.175	107.109.175	0	0	0	107.109.175	(330.400.000)
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	437.509.175	0	0	0	437.509.175	107.109.175	0	0	0	107.109.175	(330.400.000)
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	343.861.835	0	0	0	343.861.835	101.961.835	0	0	0	101.961.835	(241.900.000)

1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	61.823.670	0	0	0	61.823.670	3.323.670	0	0	0	3.323.670	(58.500.000)
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH (Dinas Lingkungan Hidup)	31.823.670	0	0	0	31.823.670	1.823.670	0	0	0	1.823.670	(30.000.000)
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.925.567.635	0	0	0	1.925.567.635	1.870.367.635	22.500.000	0	0	1.892.867.635	(32.700.000)
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.925.567.635	0	0	0	1.925.567.635	1.870.367.635	22.500.000	0	0	1.892.867.635	(32.700.000)
1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Dinas Lingkungan Hidup)	37.500.000	0	0	0	37.500.000	37.500.000	22.500.000	0	0	60.000.000	22.500.000
1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	964.947.797	0	0	0	964.947.797	955.947.797	0	0	0	955.947.797	(9.000.000)
1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	923.119.838	0	0	0	923.119.838	876.919.838	0	0	0	876.919.838	(46.200.000)
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	615.894.860	0	0	0	615.894.860	417.694.860	0	0	0	417.694.860	(198.200.000)
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	615.894.860	0	0	0	615.894.860	417.694.860	0	0	0	417.694.860	(198.200.000)

1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)	615.894.860	0	0	0	615.894.860	417.694.860	0	0	0	417.694.860	(198.200.000)
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.607.890	0	0	0	30.607.890	607.890	0	0	0	607.890	(30.000.000)
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30.607.890	0	0	0	30.607.890	607.890	0	0	0	607.890	(30.000.000)
1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	30.607.890	0	0	0	30.607.890	607.890	0	0	0	607.890	(30.000.000)
x	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	8.997.955.208	3.091.295.796	0	0	12.089.251.004	12.089.251.004
1	Pengelolaan Sampah	0	0	0	0	0	8.997.955.208	3.091.295.796	0	0	12.089.251.004	12.089.251.004
1.1	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	0	290.000.000	0	0	290.000.000	290.000.000
1.2	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DLH)	0	0	0	0	0	6.916.563.540	0	0	0	6.916.563.540	6.916.563.540

1.3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	1.409.142.000	0	0	0	1.409.142.000	1.409.142.000
1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	0	0	0	0	0	672.249.668	2.801.295.796	0	0	3.473.545.464	3.473.545.464
	Pagu Anggaran										109.323.105.032	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Rencana Kerja Tahun 2024 sebanyak 11 program, dimana 1 (satu) program Administrasi (pendukung) dan 10 (delapan) program Prioritas. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

#### URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

##### I. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

##### 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  - c. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  - d. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Hidup Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.2.

##### II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Alat Besar
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

##### III. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
  - 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
    - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
    - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
    - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
    - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
    - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- V. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**
  - 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**
    - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
    - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    - c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- VI. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**
  - 1. Penyimpanan sementara Limbah B3**
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
  - 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- VIII. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
  - 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    - a. Peningkatan Kapasitas dan Komposisi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
    - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
    - c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- IX. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
  - 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia

**X. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

**XI. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**1. Pengelolaan Sampah**

- a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

**TABEL IV.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.226.335.000		4.114.650.000	
	1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						4.226.335.000		4.114.650.000	
1	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan</i>	75 %		60 %	65 %	4.226.335.000	70 %	4.114.650.000	
	1.03.04. 2.01	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH	<i>Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai</i>	1/92592 Unit/orang		1 Unit/orang	1 Unit/oran g	4.226.335.000	1 Unit/oran g	4.114.650.000	

		KABUPATEN/KOTA								
1.03.04. 2.01.02	SUPERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/ PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA									
			<i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</i>	3 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	750.000.000	3 Dokumen	804.650.000,0 0
1.03.04. 2.01.03	PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	300000 Rumah tangga		87.594 Rumah tangga	150000 Rumah tangga	800.000.000	250000 Rumah tangga	1.210.000.000 ,00
1.03.04. 2.01.04	REHABILITASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			<i>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi</i>	2 unit		1 unit	1 unit	1.565.285.000	2 unit	1.000.000.000 ,00
1.03.04. 2.01.05	PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	300000 Rumah tangga			150000 Rumah tangga	1.111.050.000	250000 Rumah tangga	1.100.000.000 ,00

	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						101.133.768.912		132.183.435.5 55,00
	2.11	LINGKUNGAN HIDUP						101.133.768.91 2		132.183.435.5 55,00
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	100 %		100 %	100 %	80.298.467.313	100 %	109.616.635.3 94,00
	2.11.01. 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<i>Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia</i>	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	262.500.000	2 Dokumen	80.000.000,00
	2.11.01. 2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	262.500.000	2 Dokumen	80.000.000,00
	2.11.01. 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia</i>	100 %		100 %	100 %	19.415.595.197	100 %	19.500.000.00 0,00
	2.11.01. 2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN								

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	135 Orang/bulan		71 Orang/bulan	135 Orang/bulan	19.415.595.197	135 Orang/bulan	19.500.000.00 0,00
2.11.01. 2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		<i>Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia</i>	75 %		65 %	70 %	590.451.100	70 %	225.000.000,0 0
2.11.01. 2.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA									
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 paket		1 paket	2 paket	196.841.100	1 paket	75.000.000,00
2.11.01. 2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI									
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 orang			135 orang	248.610.000		0,00
2.11.01. 2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	35 orang		20 orang	20 orang	145.000.000	35 orang	150.000.000,0 0
2.11.01. 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		<i>Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i>	1 %		1 %	100 %	23.749.941.361	1 %	27.507.788.26 9,00
2.11.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR									

2.06.01			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket		1 paket	1 paket	26.695.775	1 paket	45.000.000,00
2.11.01. 2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 paket		3 paket	1 paket	75.566.680	3 paket	464.788.269,00
2.11.01. 2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA									
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 paket		4 paket	1 paket	68.481.640	4 paket	100.000.000,00
2.11.01. 2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR									
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 paket		5 paket	5 paket	21.999.953.426	5 paket	25.000.000,00
2.11.01. 2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>	5 paket		5 paket	2 paket	290.161.840	5 paket	945.000.000,00
2.11.01. 2.06.07	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL									
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	6 paket		6 paket	4 paket	62.445.000	6 paket	68.000.000,00

	2.11.01. 2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	50 laporan		40 laporan	45 laporan	67.200.000	50 laporan	65.000.000,00
	2.11.01. 2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	150 laporan		150 laporan	150 laporan	919.437.000	150 laporan	590.000.000,00
	2.11.01. 2.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	230.000.000,00
	2.11.01. 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i></li> <li>• <i>Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 1 Kegiatan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 2 Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 1 Kegiatan</li> </ul>	24.409.127.811	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 1 Kegiatan</li> </ul>	48.200.000.000,00
	2.11.01. 2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN								

			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	185 unit		219 unit	97 unit	24.186.568.226	185 unit	48.000.000,00
2.11.01. 2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA									
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	30 unit		13 unit	56 unit	222.559.585	30 unit	200.000.000,00
2.11.01. 2.08	2.11.01. 2.08	2.11.01. 2.08	<i>Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	100 %		100 %	100 %	1.063.748.336	100 %	1.673.277.400,00
2.11.01. 2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	30.000.000,00
2.11.01. 2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 laporan		3 laporan	3 laporan	334.770.936	3 laporan	670.000.000,00
2.11.01. 2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR									

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 laporan		13 laporan	13 laporan	723.977.400	13 laporan	973.277.400,0 0
2.11.01. 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		<i>Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</i>	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.727.103.508	2 Kegiatan	12.380.569.72 5,00
2.11.01. 2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN									
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 unit		1 unit	6 unit	205.770.000	5 unit	172.300.000
2.11.01. 2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	56 unit		56 unit	76 unit	9.613.760.000	56 unit	11.270.650.000
2.11.01. 2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	120 unit		120 unit	71 unit	306.850.000	120 unit	270.000.000
2.11.01. 2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA									

			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 unit		3 unit	2 unit	471.163.508	3 unit	484.939.725
2.11.01. 2.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA									
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	34 unit		13 unit	77 unit	129.560.000	34 unit	182.680.000
2.11.01. 2.13	PENATAAN ORGANISASI		<i>Persentase Cakupan Penataan Organisasi</i>	90 %		80 %	85 %	80.000.000	85 %	50.000.000
2.11.01. 2.13.03	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI									
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	80.000.000	40 Dokumen	50.000.000
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif</i>	100 %		70 %	80 %	956.006.200	90 %	820.269.725
	2.11.02. 2.01	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia</i>	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	363.526.200	2 Dokumen	820.269.725
	2.11.02.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA								

	2.01.01		<i>Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	4 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	363.526.200	4 Dokumen	820.269.725
	2.11.02. 2.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	592.480.000		0,00
	2.11.02. 2.02.02	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD								
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	592.480.000,00		0,00
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca</i>	25,4 %		25 %	25 %	5.328.133.320	25 %	7.343.675.230
	2.11.03. 2.01	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah dokumen/ laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang tersedia</i>	2 laporan		2 laporan	13 laporan	5.073.408.320	2 laporan	6.971.545.505
	2.11.03. 2.01.01	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT								

			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	8 Dokumen		9 Dokumen	8 Dokumen	1.619.114.280	8 Dokumen	2.251.685.780
2.11.03. 2.01.02	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	579.498.140	4 Dokumen	1.000.000.000
2.11.03. 2.01.03	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA									
			<i>Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</i>	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.874.795.900	2 Dokumen	3.719.859.725
2.11.03. 2.02	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA		<i>Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi</i>	75 %		30 %	50 %	249.525.000	60 %	312.129.725
2.11.03. 2.02.01	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT									
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau</i>	3 laporan		3 laporan	2 laporan	249.525.000	2 laporan	312.129.725

			<i>Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>							
	2.11.03. 2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</i>	75 %		40 %	50 %	5.200.000	60 %	60.000.000
	2.11.03. 2.03.01	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN</b>								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	5.200.000	1 Dokumen	60.000.000
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indeks kualitas tutupan lahan</i></li> <li>• <i>Persentase lokasi RTH publik yang dikelola dengan baik</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.61 Nilai</li> <li>• 87 %</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29.6 Nilai</li> <li>• 80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.27 Nilai</li> <li>• 82 %</li> </ul>	1.110.153.560	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.94 Nilai</li> <li>• 84 %</li> </ul>	511.000.000
	2.11.04. 2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik</i></li> <li>• <i>Persentase RTH yang ditangani</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Ha</li> <li>• 87 %</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Ha</li> <li>• 80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Ha</li> <li>• 82 %</li> </ul>	1.110.153.560	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Ha</li> <li>• 84 %</li> </ul>	511.000.000

2.11.04. 2.01.02		PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN								
			<i>Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Ha		4 Ha	4 Ha	850.000.000	1 Ha	200.000.000
2.11.04. 2.01.04		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)								
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Ha		3 Ha	5 Ha	200.480.000	5 Ha	250.000.000
2.11.04. 2.01.06		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI								
			<i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	50 orang		50 orang	100 orang	59.673.560	50 orang	61.000.000
5	2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<i>Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3</i>	100 %		70 %	80 %	257.700.000	90 %	425.000.000
	2.11.05. 2.01	<b>PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3</b>	<i>Cakupan pengendalian penyimpanan sementara limbah B3</i>	75 %		30 %	50 %	257.700.000	60 %	425.000.000

	2.11.05. 2.01.01	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK								
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000	1 Dokumen	175.000.000
	2.11.05. 2.01.02	VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3								
			<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>	1 laporan		1 laporan	1 laporan	206.200.000	1 laporan	250.000.000
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</i>	100 %		70 %	80 %	560.177.760	90 %	799.647.340
	2.11.06. 2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU	<i>Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan</i>	100 %		70 %	80 %	560.177.760	90 %	799.647.340

		<b>KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</i>							
2.11.06. 2.01.01	<b>FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH</b>									
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	100 Dokumen		130 Dokumen	100 Dokumen	176.152.380	100 Dokumen	320.000.000
2.11.06. 2.01.03	<b>PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
			<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	200 laporan		200 laporan	200 laporan	378.825.380	200 laporan	239.823.670
2.11.06. 2.01.04	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI UPAYA DAN RENCANA PPLH</b>									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD</i>	25 Dokumen		50 Dokumen	25 Dokumen	5.200.000,00	25 Dokumen	239.823.670

7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</i>	100 %		90 %	95 %	1.069.527.139,0 0	95 %	1.155.562.816
	2.11.08. 2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana</i>	1 Kali		1 Kali	1 Kali	1.069.527.139	1 Kali	1.155.562.816
	2.11.08. 2.01.01	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN								
			<i>Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	37.500.000	5 Lembaga	100.000.000
	2.11.08. 2.01.02	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP								
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	2 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	271.210.234	2 Dokumen	655.562.816
	2.11.08. 2.01.03	PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP								

			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>	2500 orang		2250 orang	1500 orang	760.816.905	2350 orang	400.000.000
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup</i>	100 %		70 %	80 %	341.921.960	90 %	636.254.840
	2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup</i>	5 Kali		3 Kali	3 Kali	341.921.960	4 Kali	636.254.840
	2.11.09.2.01.01	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP								
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>	400 Entitas		400 Entitas	750 Entitas	341.921.960	400 Entitas	636.254.840
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	100 %		100 %	100 %	97.107.120	100 %	137.823.670

	2.11.10. 2.01	<b>PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	100 %		100 %	100 %	97.107.120	100 %	137.823.670
	2.11.10. 2.01.01	<b>PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA</b>								
			<i>Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani</i>	65 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	97.107.120	65 Dokumen	137.823.670
10	2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<i>Persentase volume sampah yang terkelola</i>	70 %		74 %	72 %	11.114.574.540	70 %	10.737.566.540
	2.11.11. 2.01	<b>PENGELOLAAN SAMPAH</b>	<i>Timbulan sampah yang terkelola</i>	70 %		73 %	72 %	11.114.574.540	70 %	10.737.566.540
	2.11.11. 2.01.02	<b>PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATAAN, PENDAURAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI</b>								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>	1 laporan		1 laporan	2 laporan	378.150.000	1 laporan	300.000.000
	2.11.11. 2.01.03	<b>PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA</b>								

			<i>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	675000 ton		660 ton	547000 ton	7.162.803.540	670000 ton	6.916.563.540	
	2.11.11. 2.01.04	<b>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>									
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	6 Kelompok		3 Kelompok	85 Kelompok	1.223.503.000	6 Kelompok	1.815.565.000	
	2.11.11. 2.01.05	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Jakstrada</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.118.000	1 Dokumen	1.705.438.000	
		<b>JUMLAH</b>							105.360.103.91 2		136.298.085.55 5

## BAB V PENUTUP

Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini merupakan rencana kerja tahunan dan ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan kegiatan dan memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mempunyai arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan dan apa yang akan dikerjakan dalam satu tahun ini nantinya dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam perjalanan waktu, tidak tertutup kemungkinan Rencana Kerja ini akan mengalami perubahan mungkin dapat dikarenakan beberapa faktor misalnya peraturan dari pusat, kebijakan-kebijakan bidang lingkungan hidup, kebutuhan/ kepentingan organisasi yang perlu adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada. Namun demikian akan diupayakan agar perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh dari garis besar perencanaan yang telah disusun.